

PENGARUH INFLASI DAN PDB TERHADAP PENERIMAAN PPN DI INDONESIA TAHUN 1992-2022

Widya Oktaviani¹⁾, Lili Syafitri²⁾, Aris Munandar³⁾

¹⁻³ Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri

email: widyaokta2402@gmail.com, lilisyafitri6297@gmail.com, arismunandar@uigm.ac.id

Abstract

Value Added Tax (VAT) revenue is one of the significant sources of government income. VAT plays a crucial role in supporting the country's financial sustainability and financing various development programs. It is a consumption tax levied on the value added at each stage of production and distribution of goods and services. The purpose of this research is to examine the impact of inflation and Gross Domestic Product (GDP) on VAT revenue in Indonesia from 1992 to 2022. The study was conducted in Indonesia using observation methods on the websites of the Central Statistics Agency and Bank Indonesia, along with literature review and documentation. A saturated sample was used, covering 31 years of time series data. The data were analyzed using SPSS version 26, including classical assumption tests, multiple linear regression, and hypothesis testing. The partial results indicate that inflation has a negative and insignificant effect on VAT revenue. However, on the other hand, GDP significantly influences VAT revenue. This is due to increased productivity of goods and services in the economy, as well as an increase in the number of taxable objects (goods and services subject to taxation), leading to higher VAT revenue. Simultaneously, both inflation and GDP have a significant impact on VAT revenue.

Keywords: *Inflation, Gross Domestic Product, Value Added Tax Revenue*

1. PENDAHULUAN

Berbagai respons kebijakan dan kerja sama internasional mendorong perbaikan ekonomi global pada tahun 2021, meskipun tidak merata antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Kapasitas untuk divaksinasi dan stimulus kebijakan yang lebih baik menghasilkan peningkatan ekonomi nasional maju dibandingkan dengan negara berkembang. Paruh pertama dalam tahun 2021, ekonomi dunia umumnya terus berkembang, setelah dikontrak pada triwulan kedua tahun 2020. Namun, tingkat pertumbuhan triwulan ketiga tahun 2021 kembali melambat dan melebihi perkiraan, akibatnya penyebaran COVID-19 varian Delta dan kendala suplai, permintaan saat suplai dan kelangkaan energi terjadi memberikan tekanan pada kenaikan inflasi global yang lebih lama dari yang diantisipasi inflasi global 2021 lebih tinggi daripada perkiraan IMF sebelum sebelumnya, tetapi akan berkurang pada tahun 2022 [1].

Peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya di negara-negara maju, mendorong permintaan yang besar terhadap komoditas pangan dan energi. Situasi ini mengakibatkan lonjakan harga komoditas utama seperti minyak mentah, CPO, dan gandum, yang pada gilirannya mendorong inflasi yang tinggi di negara-negara yang membutuhkan komoditas tersebut. Beberapa bank sentral di negara-negara maju merespons tekanan inflasi yang tinggi ini dengan menaikkan suku bunga, yang dapat berdampak pada fundamental ekonomi domestik dalam bentuk arus keluar modal (capital outflow) serta peningkatan inflasi dan suku bunga [2].

Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat dalam periode tertentu. Faktor-faktor seperti daya beli masyarakat, pengeluaran pemerintah, dan inflasi memengaruhi pertumbuhan ekonomi [3]. Keadaan ekonomi saat ini, yang menunjukkan bahwa inflasi pada

Agustus 2023 tetap terjaga dalam kisaran sasaran $3,0\pm 1\%$. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami deflasi sebesar 0,02% (mtm) pada bulan Agustus 2023, meskipun secara tahunan mengalami inflasi sebesar 3,27% (yoy). Keberhasilan dalam menjaga inflasi pada tingkat yang sesuai dengan target sasaran tersebut adalah hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta sinergi yang erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) [4]. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5. Ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen. Sementara itu, PDB Indonesia pada tahun 2022 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9. Ekonomi Indonesia pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen. Dari kedua tahun tersebut ekonomi Indonesia meningkat di tahun 2022. Inflasi dan PDB merupakan dua faktor utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dalam lanskap perekonomian saat ini [5].

Penelitian ini didukung dengan adanya penelitian sebelumnya penelitian sebelumnya [6] menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika inflasi meningkat, penerimaan pajak pertambahan nilai cenderung menurun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan penerimaan pajak pertambahan nilai di Indonesia.

Penelitian terdahulu oleh [7] dengan hasil dari penelitiannya adalah inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pppn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi yang meningkat dapat mengurangi konsumsi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan riil masyarakat, karena kenaikan

pendapatan tidak dapat mengimbangi laju kenaikan harga. Dengan demikian, inflasi dapat berpotensi menurunkan jumlah produk yang dibeli oleh masyarakat karena harga produk meningkat. Akibatnya, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan. Ini adalah temuan penting yang menunjukkan bagaimana inflasi dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan ekonomi secara keseluruhan.

Penerimaan PPN merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang signifikan. PPN memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan keuangan negara dan pembiayaan berbagai program pembangunan. PPN merupakan pajak konsumsi yang dikenakan atas pertambahan nilai pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. Ini merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah di seluruh dunia, berkontribusi terhadap stabilitas fiskal dan mendanai berbagai layanan publik. Banyak variabel dapat digunakan untuk memahami pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN. Pertama, daya beli masyarakat dapat dipengaruhi oleh inflasi. Ketika harga barang dan jasa naik secara signifikan, orang mungkin memilih untuk membeli barang dan jasa yang lebih murah atau mengurangi jumlah yang mereka beli. Akibatnya, volume penjualan barang dan jasa yang dikenakan PPN dapat turun, yang berarti bahwa penerimaan PPN akan turun.

Kedua, harga dasar barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung besaran PPN juga dapat dipengaruhi oleh inflasi. Jika harga dasar barang dan jasa meningkat karena inflasi, besaran PPN yang dikenakan pada barang dan jasa tersebut akan meningkat. Namun, dampak ini tergantung pada kebijakan pemerintah yang menyesuaikan tarif PPN dengan inflasi. Selain itu, inflasi juga dapat berdampak pada perilaku konsumen dan pola belanja. Selama periode inflasi yang tinggi, konsumen mungkin termotivasi untuk melakukan pembelian lebih cepat untuk menghindari membayar harga yang lebih tinggi di masa depan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan konsumsi dan

selanjutnya meningkatkan pendapatan PPN. Sebaliknya, pada periode inflasi atau deflasi yang rendah, konsumen mungkin menunda pembelian sehingga mengakibatkan rendahnya penerimaan PPN. Produk Domestik Bruto (PDB) mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara. Hubungan antara PDB dan penerimaan PPN perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. PDB mencerminkan aktivitas perekonomian secara keseluruhan dan berfungsi sebagai indikator kesehatan perekonomian suatu negara [8].

Penelitian ini akan memfokuskan analisis pada periode tahun 1992-2022 karena interval waktu yang cukup panjang memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dan dampak peristiwa ekonomi penting seperti krisis moneter tahun 1998, krisis keuangan global tahun 2008 dan pandemi COVID-19 tahun 2020 dan hasil penelitian inflasi dan PDB sama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPN. PPN adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah, dan perubahan dalam inflasi dan pertumbuhan ekonomi (PDB) dapat memiliki dampak signifikan pada penerimaan PPN. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana variabel-variabel ini saling berhubungan dan memengaruhi penerimaan PPN menjadi krusial. Hasil penelitian diharapkan adanya pengaruh antar variabel inflasi dan PDB terhadap penerimaan PPN dan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara inflasi, PDB, dan penerimaan PPN di Indonesia, yang selanjutnya akan berkontribusi pada pemahaman dan perumusan kebijakan ekonomi yang lebih efektif.

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan fenomena penelitian terdahulu ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Inflasi dan Produk

Domestik Bruto terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 1992-2022”.

Rumusan Masalah

1. Apakah inflasi dan PDB berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
3. Apakah PDB berpengaruh terhadap penerimaan pajak PPN?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi dan PDB terhadap penerimaan PPN
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai
3. Untuk mengetahui pengaruh PDB terhadap penerimaan PPN

Teori Keynesian

Teori Ekonomi Keynesian, yang pertama kali diusulkan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes. Ekonomi Keynesian adalah teori makroekonomi tentang total pengeluaran dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output, lapangan kerja, dan inflasi. Keyakinan utama teori Keynesian adalah bahwa intervensi pemerintah dapat menstabilkan perekonomian. Peningkatan dan pengeluaran pemerintah dan penurunan pajak dianjurkan pada teori ini untuk merangsang permintaan dan menarik perekonomian global keluar dari Depresi. Teori Keynes menjelaskan hubungan inflasi dan produk domestik bruto. Teori ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Keynesianisme menekankan bahwa pasar tidak selalu efisien dan bahwa pemerintah harus campur tangan untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, terutama dalam situasi resesi.

Dalam teori ekonomi Keynesian, inflasi dipandang sebagai hasil dari permintaan agregat yang berlebihan dibandingkan dengan penawaran agregat. Keynesianisme berpendapat bahwa

inflasi dapat diatasi dengan mengurangi permintaan agregat melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Pemerintah dapat menggunakan instrumen seperti pajak dan pengeluaran publik untuk mengendalikan inflasi. Teori ekonomi Keynesian juga memiliki hubungan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Keynesianisme menekankan pentingnya stimulus fiskal untuk meningkatkan PDB saat terjadi resesi atau ketidakstabilan ekonomi. Melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak, teori ini berpendapat bahwa PDB dapat ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada teori ini terhubung dengan variabel yang akan diteliti yaitu inflasi, produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan PPN di mana semua kegiatan ekonomi nasional diatur melalui Kebijakan untuk menciptakan Perekonomian yang stabil dan pendapatan yang dapat meningkat dengan menyesuaikan keadaan ekonomi Indonesia.

Inflasi

Teori Kuantitas, teori yang dikemukakan oleh Irving Fisher yang menyatakan bahwa kenaikan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Teori Keynes, berdasarkan teori ini inflasi terjadi karena ada sebagian masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Keadaan seperti ditunjukkan oleh permintaan masyarakat akan barang-barang yang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Hal ini menimbulkan inflationary gap, ketika inflationary gap tetap ada maka selama itu inflasi terjadi dan berkelanjutan. Teori strukturalis, teori ini menjelaskan fenomena inflasi dalam jangka panjang karena menyoroti sebab-sebab inflasi dalam jangka panjang karena berasal dari kekakuan (infleksibilitas) struktur ekonomi suatu negara. Berdasarkan teori ini ada dua kekakuan utama dalam perekonomian negara sedang berkembang yang dapat menimbulkan inflasi, yakni: Uang inflasi dan kekakuan struktur pasar.

Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga barang dan jasa secara umum

mengalami kenaikan yang berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Dalam ekonomi, inflasi sering kali diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen (Consumer Price Index/CPI), yang mengukur perubahan rata-rata harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga [9].

Inflasi memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Salah satu dampaknya adalah pengurangan daya beli uang. Ketika harga-harga naik, uang seseorang tidak lagi memiliki kemampuan membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan standar hidup bagi masyarakat yang pendapatannya tetap atau tidak naik seiring dengan inflasi. Selain itu, inflasi juga dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Ketika harga-harga naik dengan cepat, konsumen dan produsen mungkin menjadi ragu-ragu dalam mengambil keputusan ekonomi jangka panjang. Investasi dan pengeluaran konsumen dapat menurun, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan [10].

Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menghitungnya. Diantaranya sebagai berikut [11].

1. Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu untuk menghitung tingkat inflasi dengan rerata total harga dari penjualan barang yang dibeli oleh konsumen.
2. Deflator PDB, yaitu untuk menghitung besaran perubahan harga pada keseluruhan barang, baik itu barang baru, barang produksi lokal, barang jadi maupun jasa.
3. Indeks harga produsen, yaitu indeks yang digunakan untuk mengukur harga barang yang dibutuhkan oleh produsen dalam melakukan proses produksi.
4. Indeks harga komoditas, yaitu indeks digunakan untuk menghitung harga pada beberapa barang tertentu.
5. Indeks biaya hidup, yaitu indeks yang digunakan untuk mengukur biaya hidup masyarakat (cost living index).

Kenaikan inflasi biasanya dihitung menggunakan rumus tingkat inflasi. Rumus

tersebut akan menunjukkan seberapa besar peningkatan indeks harga konsumen (IHK) pada beberapa jenis barang atau jasa tertentu dengan membandingkan IHK pada masa lalu dan masa sekarang [12].

Produk Domestik Bruto

Teori Produk Domestik Bruto terdiri dari dua pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan. Pendekatan produksi: Menurut pendekatan ini, PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan Pendapatan: Menurut pendekatan ini, PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh berbagai faktor produksi. Produk domestik bruto (PDB) adalah total produksi (output) yang dihasilkan oleh pemerintah. Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur total nilai tambah dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dalam suatu wilayah (biasanya satu negara) selama periode tertentu (biasanya satu tahun). PDB dihitung dalam mata uang lokal (seperti Rupiah) dan mencerminkan aktivitas ekonomi di dalam negeri. Semakin tinggi PDB, semakin besar kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian negara [13]. PDB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara pada suatu periode tertentu. Produk domestik bruto merupakan konsep dalam perhitungan pendapatan nasional [14].

Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah cara untuk menghitung nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya setahun. Tiga metode yang paling umum digunakan untuk menghitung PDB, yaitu [15]

1. Pendekatan Produksi

Metode ini menghitung PDB dengan menggabungkan nilai tambah dari semua produsen di seluruh negara. Metode ini juga melibatkan perhitungan berdasarkan sektor ekonomi, yaitu nilai yang dihasilkan oleh berbagai industri dan sektor, seperti manufaktur, pertanian, dan jasa, antara lain.

Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah cara untuk mengukur nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya setahun

2. Pendekatan Pengeluaran

Metode ini mengukur PDB dengan melihat total pengeluaran dalam suatu negara. Ini mencakup pengeluaran konsumen, investasi swasta, investasi pemerintah, dan saldo perdagangan yaitu ekspor dikurangi impor [16].

3. Pendekatan Pendapatan

Metode ini menghitung PDB dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam suatu negara, seperti upah, bunga, laba, dan sewa. Ini berfokus pada sumber pendapatan yang dihasilkan dari produksi.

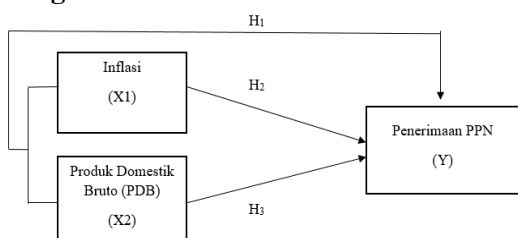
Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu jenis pajak yang dipungut saat barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) diserahkan. Pajak ini merupakan pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi [17]. Dalam praktiknya pihak penjual yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP) harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya melalui SPT Masa PPN setiap bulan: namun, pihak pembeli yang membayar pajak tersebut. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan yang dikenakan selama proses produksi dan distribusi. Dalam PPN konsumen akhir atau pembeli adalah pihak yang menanggung pajak. Semua biaya yang berkaitan dengan menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan atau dalam memberikan pelayanan jasa merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak [18].

Dalam hal subjek pajak, PPN dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas peningkatan nilai barang dan jasa. Ini dapat dihitung dengan mengurangkan harga jual dari harga beli, di mana salah satu komponen peningkatan nilai adalah keuntungan yang diharapkan. Sebagai dasar pajak, semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dan mempertahankan laba, seperti bunga, modal, sewa, tanah, upah tenaga kerja, dan keuntungan perusahaan, dianggap sebagai unsur nilai tambahan sebagai dasar pengenaan pajak [19].

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 merupakan undang-undang terbaru yang mengatur perubahan peraturan perpajakan termasuk pajak pertambahan nilai. Perubahan materi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atau Barang Mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif pajak Pertambahan Nilai final. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah Oleh peneliti, 2023

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Inflasi dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Inflasi dan PDB juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN. Inflasi, yang merupakan peningkatan tingkat harga secara umum yang berkelanjutan, dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan oleh karena itu mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dikenakan PPN yang dibeli oleh masyarakat. Sementara itu, PDB, yang merupakan ukuran total output ekonomi suatu negara, dapat mencerminkan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang dikenakan PPN. Oleh karena itu, pertumbuhan PDB yang tinggi dapat berpotensi meningkatkan penerimaan PPN. Hipotesis ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu [20] yang mengungkapkan adanya pengaruh inflasi dan PDB terhadap penerimaan PPN. Inflasi adalah gejala yang menunjukkan peningkatan tingkat harga secara umum yang berkelanjutan. Jika kenaikan harga bersifat sementara, itu tidak bisa dikatakan sebagai inflasi. Pengembangan PDB memainkan peran penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga juga berdampak pada pendapatan PPN.

H1: Inflasi dan Produk Domestik Bruto Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Jika tingkat inflasi naik, harga jual akan naik, dan harga jual tersebut adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Meningkatnya DPP PPN akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan PPN. Selain itu, biaya produksi yang lebih tinggi akan tertutupi oleh kenaikan harga barang dan jasa yang dihasilkan, terutama apabila masyarakat terus membeli barang dan jasa yang ditawarkan karena alasan kebutuhan. Oleh karena itu, penerimaan PPN akan meningkat, tetapi tingginya inflasi akan mengurangi daya beli

masyarakat, produksi perusahaan, menurunkan penghasilan kena pajak. Menurunnya konsumsi dan daya beli masyarakat sebagai akibat dari penurunan pendapatan rill individu dengan pendapatan tetap karena biasanya kenaikan upah tidak akan secepat kenaikan harga-harga sehingga orang-orang cenderung melakukan saving pada saat terjadi inflasi karena nilai rill dari uang akan menurun apabila inflasi berlaku [14].

H2: Inflasi Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pengaruh utama PDB terhadap penerimaan PPN adalah melalui konsumsi masyarakat. Ketika PDB tumbuh, pendapatan masyarakat meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat konsumsi. Semakin tinggi tingkat konsumsi, semakin banyak barang dan jasa yang dibeli oleh masyarakat, dan akibatnya semakin tinggi penerimaan PPN dari penjualan barang dan jasa tersebut. Hipotesis ini didukung dengan penelitian sebelumnya yaitu [21] yang menjelaskan bahwa PDB berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada pengembangan PDB memainkan peran penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga juga berdampak pada pendapatan PPN. H3: Produk Domestik Bruto Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Pengaruh inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia Tahun 1992-2022. Inflasi (X1) sebagai variabel bebas pertamadan produk domestik bruto (X2) sebagai variabel bebas kedua, serta penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) sebagai variabel terikat. Waktu Penelitian: Penelitian ini dilakukan selama periode Oktober 2023 hingga Januari 2024. Penelitian ini dilakukan di wilayah

Indonesia. Batasan Penelitian: Penelitian ini hanya akan fokus pada pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari database nasional.

Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data yang dipakai merupakan data sekunder terdiri dari data tingkat inflasi dan data Produk Domestik Bruto (PDB), serta data penerimaan PPN. Sumber data yaitu data tingkat inflasi, produk domestik bruto dan penerimaan pajak pertambahan nilai tahun 1992-2022. Sumber data tersebut didapat dengan mengunjungi website Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/id> dan Bank Indonesia <https://www.bi.go.id/id/default.aspx>.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, studi pustaka, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi di mana peneliti mengamati dan melakukan pengumpulan data dengan review terhadap data inflasi, produk domestik bruto dan penerimaan pajak pertambahan nilai, observasi dilakukan melalui situs Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.

b. Studi Pustaka

Teknik studi pustaka melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh inflasi dan PDB terhadap penerimaan PPN. Studi pustaka membantu peneliti memahami konteks dan latar belakang penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka [22]. Dalam dokumentasi data yang digunakan berupa data tingkat inflasi, produk domestik bruto dan penerimaan pajak pertambahan nilai tahun 1992-2022.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu data tingkat inflasi, produk domestik bruto dan penerimaan pajak pertambahan nilai di Indonesia tahun 1992 sampai dengan 2022 karena data yang digunakan memiliki rentang 31 tahun sehingga populasi pada penelitian ini berjumlah 31 data.

Sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel [22]. Karena jumlah sampel sama dengan jumlah populasi sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 31 data.

Teknik Analisis

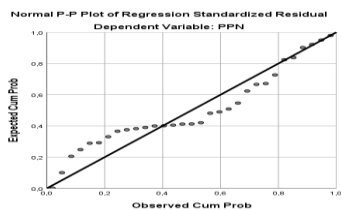
Teknik analisis menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoleniaritas. analisis regresi linier berganda, uji autokorelasi, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi.

Regresi linier berganda digunakan sebagai metode analisis data yang dipilih karena acuannya menunjukkan adanya kecocokan antara alat analisis dengan variabel yang diteliti. Pengujian dilakukan uji asumsi klasik yang dilanjutkan dengan pengujian hipotesis [23].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 2. Grafik Normal P-Plot
Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Dalam plot ini, titik-titik data tampak tersebar dan berada di sekitar garis diagonal. Pola penyebaran ini menunjukkan bahwa titik-titik tersebut tidak hanya berada di dekat garis diagonal, tetapi juga mengikuti arah garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data memiliki karakteristik tertentu. Dalam hal ini, pola penyebaran titik-titik yang mengikuti garis diagonal menunjukkan bahwa data memiliki distribusi normal. Dengan kata lain,

data tersebut mengikuti pola distribusi normal, yang merupakan asumsi penting dalam banyak teknik statistik, termasuk regresi linier.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
(Constant)	,241		
Inflasi	,824	,903	1,108
PDB	,000	,903	1,108

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan pada table di atas menunjukkan nilai Tolerance variabel inflasi sebesar 0,903, PDB sebesar 0,903 dan nilai VIF variabel inflasi sebesar 1,108, PDB sebesar 1.108. Artinya nilai Tolerance dua variabel bebas tersebut lebih dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Maka bisa disimpulkan model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi DW

Model	Change Statistics				Durbin - Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	
1	,986	956,584	2	28	,988

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Dari hasil uji Durbin-Watson (DW) yang ditampilkan pada Tabel 4.2, kita dapat melihat bahwa nilai DW adalah 0,988. Berdasarkan kriteria penilaian untuk uji DW, nilai ini masuk dalam kategori $0 < DW < dl$, yaitu $0 < 0,988 < 1,2969$, sehingga hipotesis uji DW ditolak. Dalam analisis statistik, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji autokorelasi, seperti Uji Durbin-Watson dan Uji Run. Karena hipotesis uji DW ditolak, maka penelitian ini melanjutkan dengan melakukan uji Run.

Tabel 3. Hasil Uji Run-Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-5620,44583
Cases < Test Value	15
Cases >= Test Value	16
Total Cases	31
Number of Runs	12
Z	-1,457
Asymp. Sig. (2-tailed)	,145

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan uji Runs Test diatas, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,145 lebih besar > dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi tidak dapat terselesaikan dengan Uji Durbin Watson tetapi dapat teratasi melalui Uji Runs Test sehingga analisis linier dapat dilanjutkan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
	Beta				
(Constant)	9990,893	8338,366		1,198	,241
Inflasi	-82,841	369,762	-,005	-,224	,824
PDB	,034	,001	,991	41,485	,000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan data pada tabel 4 diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 9990,893 - 82,841 X_1 + 0,034 X_2$$

Keterangan:

- Y = Penerimaan PPN
- α = Konstanta
- β_1 = Koefisien Inflasi
- β_2 = Koefisien Produk Domestik Bruto
- X₁ = Inflasi
- X₂ = Produk Domestik Bruto (PDB)
- e = Kesalahan atau error

Dari tabel analisis regresi linier berganda di atas, dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Nilai koefisien konstanta yang diperoleh sebesar 9990,893 artinya jika variabel independen inflasi dan PDB dianggap konstan atau nilainya 0, maka penerimaan PPN akan meningkat sebesar 9990,893.
2. Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan. Koefisien Regresi Inflasi bernilai negatif sebesar -82,841, artinya setiap terjadinya kenaikan inflasi sebesar 1 satuan, maka penerimaan PPN akan mengalami penurunan sebesar 82,841 dengan variabel nilai lainnya tetap. Dengan kata lain jika inflasi naik sebesar 1% maka penerimaan PPN menurun sebesar 82,841 miliar.
3. Produk domestik bruto berpengaruh positif signifikan. Koefisien Produk Domestik Bruto bernilai positif sebesar 0,034, artinya setiap terjadi kenaikan produk domestik bruto sebesar 1 satuan maka penerimaan PPN akan mengalami kenaikan sebesar 0,034 dengan asumsi variabel lainnya nilainya tetap. Dengan kata lain jika Produk Domestik Bruto naik 1% maka penerimaan PPN meningkat sebesar 0,034 miliar.

Uji Hipotesis

Uji Signifikan Stimultan (Uji Statistik F)

Tabel 5. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	124642776027,1626	2	62321388013,5813	956,584	,000 ^b
Residual	18241986659,754	28	651499523,5683		
Total	126466974693,380	30			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan analisis uji F pada tabel dapat dilihat secara stimultan variabel bebas memiliki nilai sig < 0,05 yaitu 0,000 dan F hitung sebesar 956,584. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% = 5%, df 1 = 2 dan df 2 = 28, hasil

diperoleh untuk F tabel sebesar 3,34. Dengan begitu nilai F hitung 956,584 > F table 3,34, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa variabel Inflasi (X1) dan Produk Domestik Bruto (X2) berpengaruh terhadap variabel Penerimaan PPN (Y).

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6. Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized	Standardize	t	Sig.
	Coefficients	d		
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	9990,893	8338,366		1,198
Inflasi	-82,841	369,762	-,005	-,224
PDB	,034	,001	,991	41,485

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil pengujian parsial (uji t) dapat diketahui bahwa hasil t hitung untuk inflasi sebesar -0,224 dan PDB sebesar 41,485. Berikut penjelasan hasil uji t pada semua variabel di atas:

- Variabel Inflasi (X1) terhadap Penerimaan PPN.
Berdasarkan hasil uji t, nilai t hitung untuk inflasi sebesar -0,224 dengan nilai signifikan 0,824. Diketahui df sebesar 28 dengan taraf signifikan 0,05/2 diketahui t tabel = 2,04841, karena t hitung -0,224 < t table 2,04841 dengan tingkat signifikansi di atas 0,05 yaitu sebesar 0,824 yang berarti H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Inflasi secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Penerimaan PPN.
- Variabel Produk Domestik Bruto (X2) terhadap Penerimaan PPN.
Berdasarkan nilai uji t, nilai t hitung PDB sebesar 41,485 di mana nilai t hitung 41,485 > t tabel 2,04841 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 yang berarti H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto secara parsial

berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan PPN.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	Adjusted R	Std. Error of the
	Square	Square	Estimate
1	,986	,985	25524,48870

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

- Hasil tabel menjelaskan tentang ringkasan model, yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi (R square), koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R square) dan ukuran kesalahan prediksi (std error of the estimate), antara lain:
 - R menunjukkan nilai korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R berkisar dari 0 sampai 1, jika nilai R mendekati 1 maka hubungan semakin kuat. Angka R yang didapat dalam penelitian ini adalah 0,993 yang berarti korelasi antar variabel Inflasi dan Produk Domestik Bruto terhadap Penerimaan PPN sebesar 0,993. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang begitu erat antara variabel bebas dengan variabel terikat.
 - R square (R²) untuk menunjukkan koefisien determinasi yaitu persentase sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat jika dalam regresi menggunakan tidak lebih dari dua variabel dependen. Nilai R Square sebesar 0,986 yang berarti bahwa variabel bebas (Inflasi dan Produk Domestik Bruto) mempengaruhi variabel terikat (Penerimaan PPN) sebesar 98,6% dan sisanya sebesar 1,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
 - Standard error of the estimate adalah ukuran kesalahan prediksi. Nilai standard error of the

estimate dalam penelitian ini sebesar 25524,48870 yang merupakan kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi Penerimaan PPN.

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan secara statistik dengan menggunakan SPSS versi 26 dengan uji t (parsial) dan uji F (stimultan), maka disajikan hasil hipotesis penelitian, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	t_{hitung}	t_{tabel}	F_{hitung}	F_{tabel}	Hasil Uji Hipotesis
Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN	-0,224	2,04841			Ditolak
PDB berpengaruh terhadap Penerimaan PPN	41,485	2,04841			Diterima
Inflasi PDB berpengaruh terhadap Penerimaan PPN			956,584	3,34	Diterima

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

Pengaruh Inflasi dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Tahun 1992-2022

Berdasarkan hasil penelitian, Inflasi dan Produk Domestik Bruto secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F dapat diketahui bahwa variabel bebas yaitu Inflasi dan Produk Domestik Bruto memiliki F hitung 956,584 > F table 3,34, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini secara simultan atau secara bersama-sama (Masyitah, 2019) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, maka hipotesis ketiga (H3) diterima. Dengan demikian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia.

Inflasi dan PDB juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN. Inflasi, yang merupakan peningkatan tingkat harga secara umum yang berkelanjutan, dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan oleh karena itu mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dikenakan PPN yang dibeli oleh masyarakat. Ketika inflasi terjadi, daya beli masyarakat (jumlah barang atau jasa yang dapat dibeli dengan pendapatan yang sama) cenderung menurun. Ini karena harga barang dan jasa naik, sementara pendapatan masyarakat mungkin tetap sama atau tidak naik sebanding dengan inflasi. Akibatnya, masyarakat mungkin membeli lebih sedikit barang dan jasa.

Sementara itu, PDB, yang merupakan ukuran total output ekonomi suatu negara, dapat mencerminkan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang dikenakan PPN. Oleh karena itu, pertumbuhan PDB yang tinggi dapat berpotensi meningkatkan penerimaan PPN. Produk Domestik Bruto (PDB) dapat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena kenaikan nilai PDB setiap tahunnya menunjukkan ekonomi yang berkembang dan menggambarkan pendapatan masyarakat yang meningkat. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat memengaruhi penerimaan PPN [24]

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh [24], [25] dan [20], yang menyatakan bahwa Inflasi dan Produk Domestik Bruto secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.

Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Tahun 1992-2022

Berdasarkan hasil penelitian, Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dapat diketahui bahwa Inflasi memiliki t hitung sebesar -0,224 maka nilai t hitung 0,054 < t tabel 2,04841 dengan tingkat signifikansi di atas 0,05

yaitu 0,824. Dapat disimpulkan bahwa Inflasi secara parsial berpengaruh negative tidak signifikan terhadap penerimaan PPN, dengan demikian hipotesis 1 ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa variabel Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Tahun 1992-2022. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan inflasi dapat mengurangi konsumsi masyarakat. Dampaknya, pendapatan riil masyarakat bisa menurun karena pertumbuhan pendapatan tidak sebanding dengan kenaikan harga. Inflasi juga berpotensi menurunkan jumlah produk yang dibeli oleh masyarakat karena harga produk naik, sehingga penerimaan PPN tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

PPN biasanya dikenakan pada barang dan jasa tertentu. Jika barang dan jasa tersebut tidak termasuk dalam barang yang harganya naik karena inflasi, maka penerimaan PPN mungkin tidak akan terpengaruh. Jika inflasi terjadi, kuantitas barang yang dibeli akan berkurang karena harga barang meningkat. Jika harga barang tidak meningkat, penerimaan PPN akan tetap sama dan tidak akan meningkat. Konsumen akan mengurangi pengeluarannya untuk konsumsi, sehingga penerimaan PPN tidak akan maksimal [26]. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh [7], [21], dan [27] yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Tahun 1992-2022

Berdasarkan hasil penelitian, Produk Domestik Bruto berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dapat diketahui bahwa Produk Domestik Bruto memiliki t hitung sebesar 3,141 maka nilai t hitung $41,485 > t$ tabel 2,04841 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,000. Dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, dengan demikian hipotesis 2 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis 2 yang menyatakan bahwa variabel Produk Domestik Bruto berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Tahun 1992-2022.

Pertambahan produksi barang dan jasa yang merupakan objek PPN, disertai dengan peningkatan kemakmuran masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat yang mengakibatkan penerimaan PPN semakin bertambah. Penerimaan negara akan ditingkatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDB, terutama peningkatan penerimaan di sektor perpajakan, seperti pajak-pajak yang terkait langsung. Karena produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian meningkat, jumlah objek pajak, yaitu barang dan jasa kena pajak, juga meningkat, sehingga penerimaan PPN meningkat.

Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki dampak terhadap pendapatan negara, terutama dalam hal peningkatan pendapatan dari sektor pajak. Pajak yang secara langsung terkait dengan barang dan jasa, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketika aktivitas perdagangan barang dan jasa meningkat, terutama dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang positif, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh produsen dan konsumen, tetapi juga oleh pendapatan negara. Khususnya, ini dapat menyebabkan peningkatan pendapatan di sektor perpajakan, termasuk penerimaan PPN [26].

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh [21], [28], [29], [30], dan [24] yang menyatakan bahwa variabel Produk Domestik Bruto berpengaruh signifikan pada penerimaan PPN.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait dengan “Pengaruh Inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia Tahun 1992-2022”.

1. Inflasi dan Produk Domestik Bruto berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam inflasi dan PDB dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Fenomena global dan nasional seperti kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 telah berdampak negative pada perekonomian global karena adanya pembatasan aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat sehingga inflasi rendah karena permintaan domestik bruto yang tidak kuat dan kedua hal ini mempengaruhi penerimaan PPN yang mana juga menurun pada awal Covid.
2. Inflasi tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Peningkatan aktivitas ekonomi di mana negara memiliki permintaan besar terhadap komoditas pangan dan energi yang menyebabkan tekanan inflasi yang tinggi. Namun inflasi mungkin tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena bias disebabkan beberapa factor seperti adanya perubahan perilaku konsumen dan bisnis yang memilih untuk menunda pembelian dan mencari alternative yang lebih murah ketika harga komoditas naik.
3. Produk Domestik Bruto berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pada saat pandemic covid-19 produk domestik bruto tidak tinggi karena kurangnya konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah untuk membeli vaksin dan alat medis lainnya yang menyebabkan menurunnya angka penerimaan PPN.

5. REFERENSI

- [1] I. R. Meila, “Membahas Respon Kebijakan Pemerintah dengan Memahami Kebijakan Ekonomi dan Fiskal,” *Kementrian Keuangan*, 2020. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-denpasar/baca-berita/21815/Membahas-Respon-Kebijakan-Pemerintah-Dengan-Memahami-Arah-Kebijakan-Ekonomi-dan-Fiskal.html)
- [2] Kemenkeu, “Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023,” pp. 131–132, 2022.
- [3] A. Munandar, “Analisis Regresi Data Panel Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Negara “ Negara Asia,” *J. Ilm. Ekon. Glob. Masa Kini*, vol. 8, no. 1, pp. 59–67, 2017, doi: 10.36982/jiegmk.v8i1.246.
- [4] E. Haryono, “INFLASI AGUSTUS 2023 TETAP TERJAGA,” *Bank Indonesia*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2524123.aspx (accessed Sep. 20, 2023).
- [5] Bank Indonesia, “Data Inflasi,” *Bank Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx> (accessed Sep. 20, 2023).
- [6] Y. Sapridawati, N. Indrawati, A. Sofyan, and Zirman, “Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai,” *J. Civitation Tax Cent.*, vol. 2, no. 1, pp. 2722–5437, 2021.
- [7] J. Setiawan, H. Fadjar, and Suharno, “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II,” pp. 311–321, 2020.
- [8] Royda and D. Riana, “Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan,” *Akunt. dan Manaj.*, vol. 14, no. 2, pp. 50–64, 2021, doi: 10.30630/jam.v14i2.25.
- [9] Bank Indonesia, “Inflasi,” *Bank Indonesia*, 2024. www.bi.go.id

- [10] O. Coibion, Y. Gorodnichenko, and T. Ropele, "Inflation Expectations and Firm Decisions: New Causal Evidence*," *Q. J. Econ.*, vol. 135, no. 1, pp. 165–219, Feb. 2020, doi: 10.1093/qje/qjz029.
- [11] M. Fajar, "Indikator Pengukur Inflasi," *Researchgate.Net*, no. January, 2019, doi: 10.13140/RG.2.2.34654.28482.
- [12] Sigapura, "Definisi Inflasi," *Bali Media Center*, 2016. <https://bmc.baliprov.go.id/news/title/definisi-inflasi>
- [13] A. Munandar, "Analisis Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi dan Net Ekspor Provinsi di Indonesia," *J. Ecoment Glob.*, vol. 1, no. 1, pp. 51–62, 2016.
- [14] S. Sukirno, "Makro ekonomi teori pengantar edisi ketiga," *Rajawali Pers, Jakarta*, vol. 90, 2011.
- [15] Badan Pusat Statistik, "PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA TRIWULANAN QUARTERLY," *Badan Pus. Stat.*, 2023.
- [16] Badan Pusat Statistik, "Pendapatan Nasional," *Badan Pusat Statistik*, 2023. <https://pidiekab.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html>
- [17] R. Maulida, "No Title," *Online Pajak*, 2023. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/cara-menghitung-ppn>
- [18] N. Darmayanti, "Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya," *J. Manaj. dan Akunt.*, vol. 1, no. 3, 2012.
- [19] M. Sari, L. Hertati, and V. Meiriasari, "THE EFFECT OF CONSUMER PURCHASING POWER ON VALUE ADDED TAX (PPN) IMPLICATIONS ON SALES TAX ON LUXURY GOODS (PPNBM):(Survey on Electronics Consumers at Informa Elektronik PIM Palembang)," *J. Manag. ACCOUNTING, Gen. Financ. Int. Econ. ISSUES*, vol. 2, no. 3, pp. 784–793, 2023.
- [20] A. R. Putri, D. Permatasari, T. Nurhasanah, A. A. Raudhah, and Y. Tantular, "Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, Dan Nilai Tukar Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia," 2020.
- [21] A. R. Putri, D. Permatasari, T. Nurhasanah, A. A. Raudhah, and Y. T. Rachman, "The effect of gross domestic product constant prices and inflation on value added tax revenue in Indonesia," *Int. J. Appl. Bus. Econ. Res.*, vol. 13, no. 7, pp. 5139–5157, 2020.
- [22] P. D. Sugiyono, "Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D," *Penerbit CV. Alf. Bandung*, vol. 225, p. 87, 2017.
- [23] R. Aziatul, R. Sari, and L. Syafitri, "PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RASIO HARGA LABA MASA COVID 2019 salah satu pe ndekatan yang digu nakan u ntu k me nyampaikan ku alitas pe ru sahaan , me ngu rangi asime tri informasi , dan me narik calon inve stor (Ahle rs e t al," pp. 295–302, 2021.
- [24] M. Rizqi and L. Ekowati, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Tahun 2015-2021," *Pros. SNAM PNJ*, 2022.
- [25] F. Muttaqin and R. E. Halim, "The Effect of Economic Growth and Inflation on Tax Revenue: Analysis on Areas with Dominant Economic Activities in Agriculture, Plantation, and Fisheries Sectors," vol. 135, no. Aicmbs 2019, pp. 27–33, 2020, doi: 10.2991/aebmr.k.200410.005.
- [26] P. V. Puspitha and N. L. Supadmi, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pada Penerimaan PPN (Studi

- Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak se-Bali),” vol. 22, pp. 1530–1556, 2018.
- [27] M. J. S. Dala, *Pengaruh Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Tahun 2015-2017*. 2018. [Online]. Available:
[http://repository.ub.ac.id/162539/1/Margareth Juniarti Song Dala.pdf](http://repository.ub.ac.id/162539/1/Margareth%20Juniarti%20Song%20Dala.pdf)
- [28] D. Silitonga, “Pengaruh Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto (Pdb) Indonesia Pada Periode Tahun 2010-2020,” *ESENSI J. Manaj. Bisnis*, vol. 24, no. 1, p. 2021, 2021.
- [29] N. Amelia and T. Kunawangsih, “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan PPN di Indonesia Periode 2005-2020,” *J. Ilmu Manajemen, Ekon. dan Kewirausahaan*, vol. 1, no. 2, pp. 1–16, 2023.
- [30] E. Masyitah, “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN dan PPnBm,” *Accumulated J.*, vol. 1, no. 2, pp. 89–103, 2019.